

**Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud*
Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa
(Riset Empiris Pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)**

Yarry Septia Larasati
Universitas Pancasila
y4rry_s@yahoo.co.id

Surtikanti
Universitas Komputer Indonesia
surtikanti@email.unikom.ac.id

ABSTRACT

The more rapid economic development in the world provides many benefits for the community but also accompanied by the growing fraud or commonly known as corruption case corruption handled by Corruption Eradication Commission (KPK), 70 percent of which is a case of procurement of goods and services. The aim of this study is to obtain empirical data about the influence Internal Control Role, Whistleblowing System, and Good Governance both partially and simultaneously on the prevention of fraud. This research involving 53 respondents scope directorate general of Marine Spatial Management Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia. This research in a survey by the questionnaire as instrument research. The testing of hypotheses in this study can be summed up the following that is the positive and significant role pengendallian internal, whistleblowing system and good governance whether partial simultaneous prevention and against fraud .

Keywords; Internal Control, Whistleblowing System, Good Corporate Governance, and Prevention of Fraud

ABSTRAK

Semakin pesatnya perkembangan perekonomian di dunia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat tetapi juga diiringi dengan semakin berkembangnya *fraud* atau biasa dikenal dengan istilah kecurangan Kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persen diantaranya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empiric tentang seberapa besar pengaruh Peran Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Good Governance baik secara parsial maupun simultan terhadap Pencegahan Fraud. Penelitian ini melibatkan 53 responden lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan kuesioner sebagai instrument penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Peran Pengendalian Internal, *Whistleblowing System* dan *Good Governance* baik secara parsial maupun simultan terhadap Pencegahan Fraud.

Kata Kunci; Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, *Good Corporate Governance*, dan Pencegahan *Fraud*

PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan perekonomian di dunia memberikan banyak

manfaat bagi masyarakat tetapi juga diiringi dengan semakin berkembangnya *fraud* atau biasa dikenal dengan istilah kecurangan. *Fraud* telah

berkembang secara luas, seperti halnya di Amerika Serikat. Kasus WorldCom, Global Crossing dan Adelphia yang merupakan contoh perusahaan yang jatuh akibat skandal kecurangan (*fraud*) dalam bentuk pencurian aset, kejahatan komputer, korupsi maupun manipulasi pelaporan keuangan

Menurut data yang dinyatakan oleh *Indonesia Procurement Watch* (IPW) menyatakan bahwa, dari 385 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persen diantaranya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa (<http://www.ti.or.id>). Pengadaan pemerintah yang dilakukan secara konvensional dinilai masih memiliki 3 (tiga) kelemahan yang ada dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah selama ini, yaitu: terkait transparansi, inefisiensi, dan ketidaksesuaian fungsi pengadaan (LKPP,2010). Hal ini membuktikan bahwa terdapat kesalahan dan adanya konflik kepentingan dalam suatu organisasi.

Upaya pencegahan *fraud* nampaknya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adanya peran pengendalian internal, *whistleblowing system*, *good corporate governance* dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh dalam mencegah terjadinya *fraud*. Peran pengendalian intern nampaknya mempunyai pengaruh besar terhadap upaya pencegahan terhadap *fraud*. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh beberapa pihak yang mempunyai peranan penting dalam suatu perusahaan seperti dewan direksi, manajemen dan personel lain yang dirancang untuk menyediakan jaminan memadai mengenai prestasi dari sasaran kinerja dalam (1)

efektivitas dan efisiensi operasional (2) keandalan pelaporan keuangan dan (3) pemenuhan dari ketentuan hukum yang bisa diterapkan dan regulasi (IAPI,2011). Pengendalian intern berperan penting dalam mencegah terjadinya dan mendeteksi *fraud* serta untuk melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Jika pengendalian intern dirancang dan dilaksanakan dengan baik dan pegawai melaksanakan tugasnya dengan baik maka pengendalian intern dapat diandalkan dalam melindungi diri dari *fraud*.

Fraud juga dapat dicegah dengan adanya *Whistleblowing system*. *Whistleblower System* merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Indonesia, sebagai negara di Benua Asia merupakan negara dengan budaya kolektif dimana kehidupan sosial menjadi lebih dominan dalam keseharian dibandingkan dengan kehidupan pribadi. Kondisi budaya yang seperti itu, *Whistleblower System* menjadi lebih sulit diterapkan di Indonesia. *Whistleblowing system* yang efektif akan mendorong partisipasi masyarakat dan karyawan perusahaan untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Sehingga dengan adanya *whistleblowing system* ini maka lebih dapat meningkatkan kejujuran dan keterbukaan.

Selain itu *good corporate governance* nampaknya juga berpengaruh dalam mencegah terjadinya *fraud*. Praktik dalam yang tidak sehat dalam tata kelola perusahaan memungkinkan terjadi *fraud* yang sulit terdeteksi oleh pihak pemangku kepentingan. *Corporate governance* merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer (insider) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar (kreditur atau shareholder) (Jackson, 2009). Badan Pengelola Pasar Modal di banyak negara menyatakan penerapan tata kelola perusahaan di perusahaan-perusahaan publik secara baik telah berhasil mencegah praktik kecurangan atas laporan keuangan kepada pihak yang 5 berkepentingan (Sutoyo dan Aldridge, 2005). *Fraud* juga dapat dicegah jika suatu organisasi memiliki adanya budaya etis. Budaya etis organisasi merupakan suatu pola tingkah laku, kepercayaan yang telah menjadi suatu panutan bagi semua anggota organisasi, tingkah laku disini merupakan suatu tingkah laku yang dapat diterima oleh moral dan benar secara hukum, didalam suatu budaya organisasi yang etis terdapat adanya suatu komitmen dan lingkungan yang etis pula (Pristiyanti, 2012). Jika suatu organisasi mempunyai budaya etis organisasi yang rendah maka akan mendorong karyawannya untuk melakukan tindakan *fraud* atau kecurangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik budaya etis organisasi suatu instansi, maka akan semakin rendah kecenderungan karyawan melakukan *fraud* atau kecurangan.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka masalah dirumuskan penulis sebagai berikut: seberapa besar pengaruh peran pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*, seberapa

besar pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*, tentang seberapa besar pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dan seberapa besar pengaruh peran pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good corporate governance* secara simultan terhadap pencegahan *fraud*. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis tentang besar pengaruh peran pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*, menganalisis tentang besar pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*, menganalisis tentang besar pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dan menganalisis tentang besar pengaruh peran pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good corporate governance* secara simultan terhadap pencegahan *fraud*.

Rerangka Teoritis

Akuntansi Forensik

Menurut Crumbley dan Apostolou (2002) menyebutkan bahwa akuntansi forensik dan investigasi sebagai aplikasi kecakapan finansial dan sebuah mentalitas penyelidikan terhadap isu-isu yang tak terpecahkan, yang dijalankan dalam konteks *rules of evidence*”.

Menurut Hopwood et al (2008) akuntansi forensik merupakan aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan dan hukum.

Sedangkan menurut Theodorus M Tuanakotta (2010) akuntansi forensik adalah penerapan sistem akuntansi dalam bidang hukum

terutama pada permasalahan kecurangan atau *fraud*.

Akuntansi forensik sebagai aplikasi ilmu akuntansi yang bermanfaat dalam penyelesaian dan pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan demikian diperlukan akuntan forensik yang mempunyai keahlian dalam menginvestigasi indikasi adanya korupsi atau tindak penyelewengan lainnya di sebuah perusahaan atau instansi negara. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak (Hartanti, 2005). Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam kejahatan *White Collar Crime*. korupsi adalah penjualan barang-barang milik pemerintah oleh pegawai negeri untuk keuntungan pribadi.

Pengendalian Internal

Menurut Drs. Amin Widjaja Tunggal (2010) pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personal entitas lain yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) Keandalan pelaporan keuangan (b) Efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Krismiaji (2010) pengendalian internal (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) (2013) pengendalian intern adalah suatu cara sistematis yang dijalankan oleh seluruh pegawai dalam suatu perusahaan yang

digunakan untuk melindungi aktiva dan memberikan informasi yang akurat dan memadai dalam mencapai tujuan keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Indikator Pengendalian Internal

Menurut Drs. Amin Widjaja Tunggal (2010) ada lima komponen

pengendalian yaitu sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian Internal (*Control Environment*)
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and communication*)
5. Pemantauan (*Monitoring*)

Whistleblowing System

Staley dan Lan (2008) mengatakan bahwa *whistleblowing* adalah cara yang tepat untuk mencegah dan menghalangi kecurangan, kerugian, dan penyalahgunaan. Sedangkan Elias (2008) mengatakan bahwa *whistleblowing* adalah pelaporan oleh anggota dari suatu organisasi (sekarang atau terdahulu) terhadap praktek ilegal, imoral, dan haram yang berada dibawah kontrol karyawan terhadap orang atau organisasi yang mungkin dapat mengakibatkan suatu tindakan.

Menurut Near dan Miceli (1985) mengartikan *whistleblowing* sebagai suatu pengungkapan yang dilakukan anggota organisasi atas suatu praktik-praktik illegal atau tanpa legitimasi hukum di bawah kendali pimpinan mereka kepada individu atau organisasi yang dapat menimbulkan efek tindakan perbaikan.

Menurut Gottschalk (2011), *whistleblowing* adalah pengungkapan oleh anggota organisasi (atau mantan) ilegal, tidak bermoral, atau praktik-praktik tidak sah di bawah kendali pemberi kerja mereka, kepada orang-orang atau organisasi yang mungkin dapat memengaruhi tindakan.

Indikator *Whistleblowing System*

Di dalam Pedoman *Whistleblowing System* yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governance-KNKG (2008), sistem *whistleblowing* terdiri dari 3 aspek, yaitu:

- a) Aspek Struktural
- b) Aspek Operasional
- c) Aspek Perawatan

Good Corporate Governance

Sutedi (2011) mengemukakan pengertian *good corporate governance* secara definitif adalah: “Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder”.

Good Governance menurut Mardiasmo (1999) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sector public oleh pemerintahan yang baik. Sedangkan menurut *Organizations for Economic Cooperation and Development-OECD* yang dikutip oleh Sutojo dan Aldridge (2005) *Corporate governance* adalah seperangkat tata hubungan diantara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan.

Indikator *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance-KNKG (2006) ada lima aspek dalam prinsip-prinsip GCG, yaitu:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Responsibilitas
4. Independensi
5. Kewajaran dan Kesetaraan

Pencegahan *Fraud*

G.Jack Bologna, Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells (1993) mendefinisikan kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012), Kecurangan (*fraud*) adalah penipuan yang disengaja, umumnya diterangkan sebagai kebohongan, penjiplakan dan pencurian.

Jones dan Bates (1990) dalam *Public Sector Auditing* menyatakan *fraud dalam Thef Act 1968* adalah penggelapan yang meliputi berbagai kecurangan, antar lain penipuan yang disengaja (*intentional deceit*), pemalsuan rekening (*falsification of account*), praktek jahat (*corrupt practices*), penggelapan atau pencurian (*embezzlement*), korupsi (*corruption*) dan sebagainya. *Fraud* terjadi dimana seseorang memperoleh kekayaan atau keuntungan keuangan melalui kecurangan atau penipuan. Kecurangan semacam ini menunjukkan adanya keinginan yang disengaja, tidak termasuk ketidaktahuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah berbagai macam cara kecerdikan manusia yang direncanakan dan dilakukan secara individual maupun

berkelompok yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya untuk keuntungan pribadi dan atau keuntungan organisasi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku dengan cara menyembunyikan dalam atau melalui rekayasa yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Karakteristik *Fraud*

Fraud selalu dikaitkan korupsi, padahal karakteristik atau jenis-jenis *fraud* itu sendiri banyak tidak hanya korupsi saja. Menurut ACFE dalam Tuanakotta (2010) membagi *fraud* (kecurangan) terdiri 3 (tiga) jenis berdasarkan perbuatan dikenal *fraud tree*. *Occupational Fraud Tree* memiliki tiga cabang utama yaitu *Corruption*, *Asset Misappropriation*, dan *Fraudulent Statement*.

Pencegahan *Fraud*

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations-COSO* (1992) Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku.

Menurut Sudarmo, Sawardi, & Yulianto, A. (2008) pencegahan *fraud* adalah upaya yang terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*) yaitu:

1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan
2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya
3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/rasionalisasi atas tindak kecurangan yang dilakukan.

Indikator Pencegahan *Fraud*

Menurut Pope (2007), pencegahan *fraud* dalam hal pengadaan barang publik, antara lain:

1. Memperkuat kerangka hukum.
2. Prosedur transparan.
3. Membuka dokumen tender.
4. Evaluasi penawaran.
5. Melimpahkan wewenang.
6. Pemeriksaan dan audit independen.

Kerangka Pemikiran

Hubungan Pengendalian Internal dengan Pencegahan *Fraud*

Hubungan antara pengendalian internal dengan masalah kecurangan dalam perusahaan sangat erat kaitannya. Pengendalian internal dalam suatu perusahaan dipercaya dapat bermanfaat dalam membantu perusahaan untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Menurut Tuanakotta (2007), bahwa upaya mencegah *fraud* dimulai dari pengendalian intern. Disamping pengendalian intern, dua konsep penting dalam pencegahan *fraud* yaitu menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* (*fraud awareness*) dan upaya menilai resiko terjadinya *fraud* (*fraud risk assessment*).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *fraud* dapat dikurangi bahkan dicegah dengan membudayakan kejujuran, keterbukaan,

dan saling membantu satu sama lain serta menghilangkan peluang seseorang untuk melakukan *fraud* dengan menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* dan sanksi atas perbuatan tersebut.

Hubungan *Whistleblowing System* dengan Pencegahan *Fraud*

Widyantari (2013) menyatakan bahwa efektivitas sistem *whistleblowing* membantu perusahaan keluar dari kecurangan yang terjadi dalam perusahaan dan membantu perusahaan agar mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan perusahaan dengan cara yang bersih. Pendapat Priantara (2013) menyebutkan bahwa salah satu sistem yang digunakan dalam mencegah terjadinya kecurangan adalah dengan menerapkan sistem pelaporan dugaan *fraud* (*Whistleblower hotlines*). Di Amerika sistem *Whistleblower hotlines* ini diwajibkan karena menurut berbagai survei disana, sistem ini menjadi alat yang paling utama untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan karena calon pelaku pastinya akan merasa takut bila diadukan.

Irvandly (2014) menemukan bahwa penerapan *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Jadi semakin baik penerapan *whistleblowing system* di dalam perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pencegahan kecurangan.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Whistleblowing system* dapat mencegah terjadinya *fraud* karena sistem ini dapat dengan cepat mendeteksi adanya *fraud* sehingga dapat langsung di tindak lanjuti laporan yang telah disampaikan oleh *whistleblower*.

Hubungan *Good Corporate Governance* dengan Pencegahan *Fraud*

Struktur *corporate governance* mengenal 2 (dua) mekanisme tatakelola yaitu tatakelola internal dan tatakelola eksternal. Masing-masing tatakelola internal dan eksternal mempunyai elemen-elemen yang kalau semua elemen tatakelola eksternal dan internal tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka *fraud* dapat dicegah atau dikurangi.

Menurut Gusnardi (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit, pengendalian internal, audit internal, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik akan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan perusahaan. Innosanto Beawiharta (2014) juga mengatakan bahwa implementasi *good government governance* berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan karena semakin tinggi implementasi *good government governance*, maka tindakan pencegahan kecurangan akan semakin meningkat. Menurut Rahadi Aprijana (2014) menyatakan bahwa Dengan menerapkan *good governance* dan meningkatkan keahlian yang lebih profesional dalam pengawasan dan pemeriksaan mengenai penyajian laporan keuangan, maka akan mampu melakukan pencegahan dan pendeteksian suatu kecurangan serta menciptakan keberhasilan tujuan organisasi. Dengan tercapainya tujuan organisasi, maka terbuka menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sehingga akan memberikan dampak positif bagi tujuan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan Hipotesis

Dari kerangka pemikiran di atas, maka penulis dapat menyusun beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*

H2 : *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*

H3 : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*

H4: Pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kausatif., Metode penelitian yang dilakukan adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner kepada responden. Jenis pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran ordinal.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Lapangan (*Field Reserach*)
 - a. Metode Wawancara
 - b. Metode Angket/Kuesioner
2. Studi Pustaka

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sampel terdiri dari anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang berjumlah 53 orang.

Metode yang digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Model regresi yang digunakan dirumuskan:

$$Y = aB^1X^1 + B^2X^2 + B^3X^3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Pencegahan *Fraud*

X₁ = Pengendalian Internal

X₂ = *Whistleblowing System*

X₃ = *Good Corporate Governance*

ε = Variabel lain yang tidak diteliti tapi berpengaruh (contoh: Peran Audit Internal dan Budaya Etis)

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Analisis Data

Nilai R sebesar 0,749 pada tabel 4.30 menunjukkan kekuatan hubungan ketiga variabel independen (pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *good governance*) secara simultan dengan pencegahan fraud. Jadi pada permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa secara simultan ketiga variabel independen (pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *good governance*) memiliki hubungan yang kuat dengan pencegahan fraud pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kemudian nilai R-Square sebesar 0,562 atau 56,2 persen, menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara simultan mampu menerangkan pencegahan fraud sebesar 56,2 persen. Artinya secara bersama-sama pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *good governance* memberikan pengaruh atau

kontribusi sebesar 56,2% terhadap pencegahan *fraud* pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati adalah sebesar 43,8%, yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar ketiga variabel independen yang diteliti seperti Budaya Etis Organisasi dan Peran Audit Internal.

Pembahasan

Pengaruh Peran Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini membuktikan bahwa salah satu faktor penyebab seseorang melakukan *fraud* yakni adanya *opportunity* atau kesempatan dapat dicegah dengan adanya pengendalian internal yang baik pada suatu institusi atau organisasi.

Besarnya pengaruh Peran Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* adalah 13,18% dan sisanya sebesar 86,82% dipengaruhi oleh factor lain selain pengendalian internal seperti *Whistleblowing System*, *Good Governance*, Peran Audit Internal dan Budaya Organisasi. Hal ini membuktikan bahwa peran pengendalian internal tidak dominan dalam pencegahan *fraud*.

Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini membuktikan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan *fraud* yang

berasal dari faktor general yakni adanya *opportunity* atau kesempatan dan *exposure* atau pengungkapan dapat dicegah dengan adanya *whistleblowing system* yang efektif sehingga pelaku kecurangan jera dan berpikir kembali untuk melakukan kecurangan tersebut.

Besarnya pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* 11,16% dan sisanya sebesar 88,84% dipengaruhi oleh faktor selain *whistleblowing system*. Hal ini membuktikan bahwa *whistleblowing system* bukan faktor dominan dalam pencegahan *fraud* tetapi ada faktor lain yang dominan seperti *Good Governance*, Peran Audit Internal dan Budaya Etis Organisasi.

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini membuktikan bahwa faktor penyebab *fraud* seperti adanya *opportunity* dan *rationalization* dapat dicegah dengan adanya *good governance* yang baik karena setiap tindakan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan. Besarnya pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* 31,9% dan sisanya sebesar 68,1% dipengaruhi oleh factor lain selain *good governance* sehingga membuktikan bahwa *good governance* tidak dominan dalam pencegahan *fraud*.

Pengaruh Peran Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan *Good Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Hipotesis keempat yang diajukan menunjukkan bahwa pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good governance* secara simultan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Besar pengaruh peran pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good governance* terhadap pencegahan *fraud* sebesar 56,2% dan sisanya sebesar 43,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good governance* secara bersama-sama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Semakin baik pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good governance* maka dapat meningkatkan pencegahan *fraud*.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian serta pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Penerapan Pengendalian Internal pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan berada pada kategori baik. Peran Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud, hal ini terbukti bahwa hasil penelitian mendukung teori dan hasil penelitian juga membuktikan fenomena yang terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengendalian internal maka dapat

meningkatkan pencegahan fraud. 2) *Whistleblowing System* pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan berada pada kategori baik. *Whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini mendukung teori dan hal ini membuktikan fenomena yang terjadi dimana *whistleblowing system* tidak berpengaruh secara dominan. Dalam penerapan *whistleblowing system* maka perlu diperhatikan peran sistem pelaporan dan perlindungan bagi *whistleblower* sehingga akan tercipta sistem *whistleblowing* yang efektif, transparan dan bertanggungjawab. Jadi dapat diartikan bahwa semakin baik *whistleblowing system* maka dapat meningkatkan pencegahan fraud. 3) *Good Corporate Governance* pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan berada pada kategori sangat baik. *Good governance* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini mendukung teori dan hasil penelitian ini juga membuktikan fenomena yang terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik *good governance* maka dapat meningkatkan pencegahan *fraud*. 4) Pencegahan Fraud pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan berada pada kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* pada institusi ini sudah dilakukan dengan sangat baik. 8) Pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semakin baik pengendalian internal, *whistleblowing*

system, dan *good corporate governance* maka dapat meningkatkan pencegahan *fraud*.

Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain : 1) Berdasarkan hasil olah data penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa sebesar 56,2% variabel independen pengendalian internal, *whistleblowing system* dan *good governance* memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap variabel dependen pencegahan fraud dan sisanya pengaruh faktor-faktor lain diluar ketiga variabel independen yang diteliti yang tidak diamati adalah sebesar 43,8% sehingga masih banyak variabel yang cukup berpengaruh tetapi tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 2) Jurnal ilmiah untuk membantu penelitian ini masih terbatas jumlahnya. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

a. Bagi Praktis:

1. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang dan Laut dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pada proses pengadaan barang/jasa sehingga dapat terselenggaranya *good governance* yang baik.

b. Bagi Akademis

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel penelitian dan juga menambah responden dari

berbagai unit bagian lainnya untuk mencapai hasil yang lebih baik.

2. Bagi ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mencegah *fraud* dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. Steve, Chad O. Albrecht. 2012. *Fraud Examination and Prevention*. Thomson, South-Western: Australia
- Bologna, J. 1993. *Handbook of Corporate Fraud*. Butterworth-Heinemann: Boston
- Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO), 1992. Adendum 1994. Internal Control Integrated Framework. AICPA Publication
- COSO, 2013, Internal Control-Integrated Framework: Executive SUMMARY, Durham, North Carolina, May 2013
- Crumbley, D. Larry, *Forensic and Investigative Accounting*. USA : 5 Agustus 2002.
- Elias, Rafik. 2008. Auditing Students' Professional Commitment and Anticipatory Socialization and Their Relationship To Whistleblowing. "Managerial Auditing Journal, Vol. 23, No.3, h.283-294.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).2006. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Jakarta
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).2008. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP (*Whistleblowing System-WBS*). Jakarta
- Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 2010, *Modul 1 Pelatihan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama*, Team LKPP. Jakarta.
- Pristiyanti, I. R. (2012). Persepsi Pegawai Instansi Pemerintahan Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. *Accounting Analysis Journal*, ISSN 2252-6765 .
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Maurice E. Peloubet. Journal of Accountancy edisi Juni 1946. Forensic Accounting: Its place in today's economy. h.34
- Nawawi Muzakky.2012. Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. <http://zqzakky.blogspot.co.id> diakses pada Februari 2016
- Miceli, M. P. & J. P. Near. (1985). Characteristics of Organizational Climate and Perceived Wrongdoing Associated with Whistle-Blowing Decisions, *Personnel Psychology*, 38, vol 4:1.
- Pope, Jeremy, 2007, Strategi Memberantas Korupsi: El
- Rina. 2016. Laporan Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa 2015. <http://news.detik.com> diakses pada Februari 2016
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutojo, Siswanto. Aldridge, E. John. 2005. *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*. Jakarta : PT. Damar Mulia Rahayu
- Tuanakotta, Theodorus M. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Salemba Empat: Jakarta
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, SALEMBA Empat: Jakarta
- Tunggal, Amin Widjaja. 2010. *Teori dan Praktek Auditing*. Harvarindo: Jakarta
- Sudarmo, Sawardi, & Yulianto, A. 2008. *Fraud Auditing Edisi Kelima*. Pusdiklat BPKP: Jakarta

Lampiran:

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Kuesioner No	Skala
Pengendalian Internal (X1)	Tunggal(2010:195) Suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personal lainnya yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini (a) Keandalan pelaporan keuangan (b) Efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) Kepatuhan terhadap hukum.	Tunggal(2010:196) • Lingkungan pengendalian, • Fungsi risiko, • Aktivitas pengendalian, • Informasi dan komunikasi, • Pemantauan	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 12,13,14 15,16 17,18,19 20,21	Ordinal
Whistleblowing System (X2)	Blas(2008:283) Pelaporan oleh anggota dari suatu organisasi (sekarang atau terdahulu) terhadap praktik ilegal, moral, dan hukum yang berada dibawah kontrol karyawan terhadap orang atau organisasi yang mungkin dapat mengakibatkan suatu tindakan.	KSNKQ(2008:9) • Aspek struktural, • Aspek operasional, • Aspek perawatan	22,23,24,25,26,27 28,29,30 31,32,33	Ordinal
Good Corporate Governance (X3)	Sutedi(2011:1) Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (<i>value added</i>) untuk semua stakeholder.	KSNKQ(2006:5) • Transparansi • Akuntabilitas • Responsibilitas • Independensi • Kewajaran dan Keastaraan	34,35,36 37 38 39 40	Ordinal
Pencegahan Fraud (Y)	Tuanakotta(2007:168) <i>A system of "special purpose" processes and procedures designed and practiced for the primary if not sole purpose of preventing or deterring fraud</i>	Pupei(2007:388) • Mempertahat kerangka hukum • Prosedur transparan • Membuka dokumen tender • Diskusi penawaran • Melampirkan Wewenang • Pemenkasan dan audit Independen	41,42 43,44,45 46 47 48 49	Ordinal

Tabel 2
Hasil Estimasi Persamaan Regresi

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,309	,520		,593	,556
Pengendalian Internal	,267	,090	,293	2,980	,004
Whistleblowing System	,209	,093	,232	2,245	,029
Good Governance	,537	,111	,497	4,856	,000

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Tabel 3
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,749 ^a	,562	,535	,27580

a. Predictors: (Constant), Good Governance, Pengendalian Internal, Whistleblowing System

b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud